

Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Nurnaningsih Nurnaningsih

Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia

Corresponding Email: nurnaningsihsyarif84@gmail.com

Abstract

This study examines the impact of poverty, unemployment, and economic inequality on inclusive growth in Indonesia. The data used in this study is panel data from 34 provinces in Indonesia. The analysis technique used is panel data regression with a fixed effect model. Based on the research results, it is clear that the relationship between poverty, unemployment, and economic inequality is negative and significant on inclusive economic growth in Indonesia. The analysis also emphasizes that efforts to achieve inclusive economic growth must focus on community empowerment, investment in education and training, inclusive infrastructure development, and policies focused on sustainable economic development.

Keywords: Poverty; Unemployment; Economic Inequality; Economic Growth

I. Pendahuluan

Indonesia mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi (Wibowo, 2020). Pertumbuhan ekonomi indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Valickova et al., 2020). Namun, permasalahannya adalah menjamin pembangunan kesejahteraan rakyat (Dauda, 2020). memperhatikan pemerataan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan serta pengangguran. (Fosu, 2020). Strategi pembangunan ekonomi lebih diarahkan untuk memperhatikan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Yurui et al., 2021). Pertumbuhan inklusif merupakan konsep yang mengembangkan kesempatan yang adil bagi para pelaku ekonomi selama pertumbuhan ekonomi. (Naustdalslid, 2020).

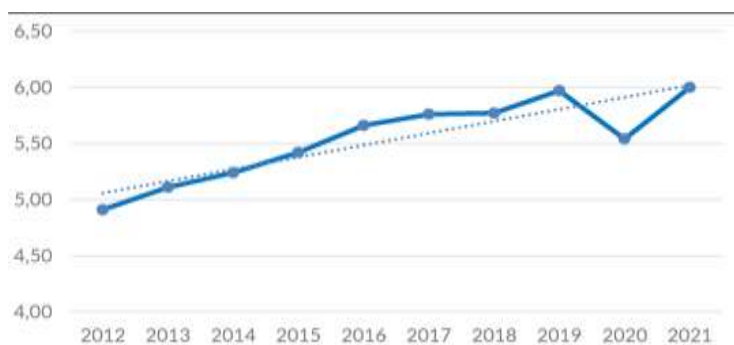
Tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menurut Asian Development Bank (2011), menjelaskan bahwa dengan mempertimbangkan keselarasan dan keadilan, diperlukan pemerataan pertumbuhan yang baik dan inklusif di seluruh wilayah. Kedua, pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan yang tinggi akan menimbulkan kondisi sosial yang membahayakan. Ketiga ketimpangan yang terus terjadi tersebut akan berdampak pada stabilitas politik, sehingga mengganggu pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan ketimpangan sosial dan ekonomi (Libassi, 2020; Nugraha et al., 2020). Masih banyak penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan terpinggirkan dari kemajuan ekonomi (Gupta et al., 2020; Leichenko & Silva, 2020; Gatzweiler & Baumüller, 2020). (Hensher, 2020; Kanda & Kivimaa, 2020).

Permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun sekitar 9,2 persen atau sekitar 24 juta orang masih akan hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Angka kemiskinan juga lebih tinggi di daerah pedesaan dan terpencil (Wirawan & Gultom, 2021; Priasto & Ginting, 2020). Kemiskinan merupakan hambatan yang signifikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, karena orang miskin tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya (Kim et al., 2020; Scheyvens & Biddulph, 2020; Etuk et al., 2020. Dauda (2020) meningkatnya kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Nigeria, mencakup pertumbuhan pengangguran, dan kegagalan inisiatif penanggulangan kemiskinan untuk mengatasi transformasi struktural yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan menjembatani kesenjangan pendapatan dalam perekonomian. Dengan tujuan yang sama, GarzaRodriguez (2020) meneliti masalah pertumbuhan ekonomi di Meksiko, yang menunjukkan pengaruh

negatif kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dengan hasil serupa juga telah diteliti oleh Iniguez-Montiel (2020).

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia 2012-2021



Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia (Siregar, 2020; Sasongko & Huruta, 2020). Pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan berdampak pada menurunnya permintaan barang dan jasa (Amorós et al., 2020; Omoniyi, 2020). Selain itu, pengangguran juga dapat memperparah kemiskinan dan ketimpangan sosial dan ekonomi, (Prawitz et al., 2020; Gudmundsdottir, 2020). Akibatnya, angka kemiskinan dan ketimpangan sosial dan ekonomi dapat semakin memburuk, sehingga memperparah dampak negatif pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hubungan kompleks antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi telah diteliti oleh Mohseni dan Jouzaryan (2020), yang meneliti pengaruh kedua variabel ini di Iran. Studi lain oleh Olusadum (2020) meneliti situasi di Afrika Selatan.

Ketimpangan antara daerah maju dan daerah tertinggal juga menjadi masalah di Indonesia (Yusuf & Resosudarmo, 2020; Gibson et al., 2021). Terdapat ketimpangan yang signifikan dalam hal pengeluaran rumah tangga antara provinsi maju dan provinsi tertinggal (Turner, 2014). Ketimpangan ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial dan ekonomi (Ncube et al., 2020; Ratnawati, 2020). Ketimpangan dapat memperkuat dominasi kelompok yang sudah kaya dan menghambat kemajuan kelompok kurang mampu (Jetten, 2020). Kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi serta memperburuk kesenjangan antarkelompok masyarakat. Penelitian terkait ketimpangan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan di beberapa negara (Halter et al., 2020; Goschin, 2020; Kim, 2020).

Berdasarkan teori tersebut, dapat dicermati dari penelitian terdahulu bahwa hubungan antar variabel dengan pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki beberapa hasil yang berbeda dari beberapa penelitian terdahulu. Sejalan dengan penelitian (Hapsari et al., 2020; Rini & Hamonangan, 2021) yang menjelaskan fenomena pertumbuhan inklusif dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan lapangan kerja lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian barat. Begitu pula dengan penelitian Andrian (2020), Sholihah et al. (2020), dan Purwanti & Rahmawati (2021) yang membuktikan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif tetapi belum sepenuhnya inklusif yaitu metode *poverty equivalent growth* (PEG). Berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh Anyanwu et al. (2013) dan Lee & Sissins (2016) yang menemukan bahwa variabel pendidikan dan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, penelitian Sitorus dan Arsani (2020) tentang pertumbuhan ekonomi inklusif menunjukkan hasil yang memuaskan untuk infrastruktur dan pendidikan. Penelitian Folarin (2020) menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif memiliki hubungan positif karena dicapai dengan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Kemudian, beberapa penelitian terdahulu di tingkat provinsi, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurlina (2021) menyatakan bahwa kemiskinan dan Gini Ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Aceh. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2021) dengan analisis uji statistik menunjukkan adanya pengaruh COVID-19 yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur. Dalam penelitiannya, Azwar (2020) menyatakan bahwa variabel pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aimon (2020) pertumbuhan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, investasi, dan belanja pemerintah. Sementara itu, pertumbuhan inklusif pada ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, investasi, dan belanja pemerintah di Sumatera Barat.

Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh pesat, masih terdapat masalah yang signifikan, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Analisis menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi yang hanya mengandalkan statistik nasional. Analisis juga menekankan bahwa upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur yang inklusif, dan kebijakan yang berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, penelitian dengan menggunakan data panel dari seluruh provinsi di Indonesia masih perlu dilakukan terkait pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, dan menganalisis pengaruh tingkat pembangunan, keterampilan, dan kesehatan SDM

II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh berasal dari situs publikasi Badan Pusat Statistik dan Perencanaan Pembangunan menggunakan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di provinsi-provinsi Indonesia tahun 2012-2021. Sebagai pembanding, variabel bebas menggunakan data kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi di provinsi-provinsi Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat nasional. Analisis regresi data panel menggabungkan data time series dan cross-section dengan metode model estimasi: Common Effect Model, Random Effect Model, dan Fixed Effect Model. Menggunakan dua teknik estimasi model. Kedua teknik tersebut digunakan dalam regresi data panel untuk memperoleh model yang tepat dalam estimasi regresi data panel, Uji Chow, dan Uji Hausman. Uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Analisis data panel membantu mengevaluasi pengaruh variabel Kemiskinan Independen (P), Pengangguran (U), dan Ketimpangan Ekonomi (EI) terhadap Variabel Dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IEG).

III. Hasil dan Pembahasan

Dari perspektif pengukuran kualitas pertumbuhan ekonomi, selain melihat capaian indikator ekonomi dan sosial, pengukuran kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI). Indeks komposit ini disusun berdasarkan metode pemeringkatan dan skema pembobotan. Untuk ukuran pertumbuhan ekonomi, termasuk di provinsi-provinsi di Indonesia, dilihat dengan menggunakan pengukuran, yaitu capaian skala 1-3 persen kurang memuaskan, skala 4-7 persen memuaskan, dan skala 7-9 persen sangat memuaskan.

Menurut data yang dipublikasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPENAS), provinsi dengan pertumbuhan ekonomi inklusif tertinggi di Indonesia selama

tahun 2012-2021 adalah Provinsi DKI Jakarta, dengan skor kepuasan rata-rata sebesar 7.197 persen. Jakarta memiliki sistem ketenagakerjaan yang kondusif untuk menekan angka kemiskinan dan menyerap tenaga kerja. Sementara itu, Provinsi Papua memiliki pertumbuhan ekonomi inklusif terendah dengan nilai rata-rata sebesar 3.717 persen.

Pertumbuhan ekonomi inklusif yang tinggi di Provinsi DKI Jakarta terjadi karena beberapa faktor, seperti kondisi geografis, keberadaan pusat bisnis dan keuangan, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung inklusivitas ekonomi. Selain itu, Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia, sehingga banyak perusahaan nasional maupun internasional yang memiliki kantor pusat dan cabang di Jakarta (Firman & Fahmi, 2020). Jakarta dengan banyak kesempatan kerja di berbagai sektor, seperti keuangan, perdagangan, jasa, dan industri. Pemerintah daerah juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperluas lapangan kerja, seperti program pelatihan kerja dan pendidikan yang berfokus pada kebutuhan industri (Sulistiyadi et al., 2020). Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan kerja untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Dengan tersedianya lapangan kerja dan kemudahan akses, masyarakat dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sistem ketenagakerjaan yang kondusif di Jakarta memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan (Lestari & Rahmawati, 2021).

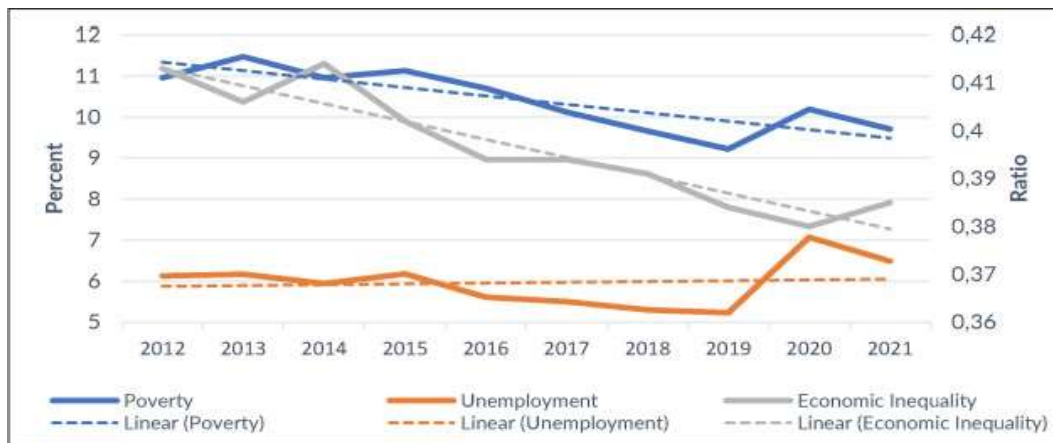
Pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Papua tergolong rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Wilayah Papua masih menghadapi kendala infrastruktur, ketersediaan energi, dan aksesibilitas terhadap pasar dan sumber daya (Fauzi et al., 2020). Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif. Minimnya aksesibilitas terhadap pendidikan dan keterampilan membuat warga Papua sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif (Dong & Manning, 2020). Selain itu, tingginya angka kemiskinan di wilayah Papua membuat banyak warga Papua kesulitan mendapatkan pekerjaan layak dan mengembangkan usaha. Perbedaan budaya dan bahasa yang signifikan di wilayah Papua dapat menghambat pembangunan ekonomi inklusif.

Tren kemiskinan di Indonesia relatif menurun setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti program keluarga harapan, bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung non tunai (Aziz et al., 2021). Program-program tersebut bertujuan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya terjadi di wilayah tertentu, seperti Jawa dan Bali, sedangkan wilayah lainnya masih membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan antar wilayah.

Angka pengangguran menunjukkan tren penurunan selama tahun 2012–2021, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan kerja (Tamsah et al., 2020). Namun, masih terdapat kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga berdampak pada jumlah pengangguran (Atmojo & Fridayani, 2021). Meskipun terjadi penurunan jumlah pengangguran, penurunan tersebut masih belum signifikan dibandingkan

dengan jumlah penduduk Indonesia. Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan tersebut belum optimal. Kondisi ini terjadi karena banyak sektor ekonomi yang belum berkembang dengan baik, serta masih terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Gambar 2.
Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif



Kemiskinan dan pengangguran menunjukkan tren menurun, tetapi ketimpangan menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2012–2021 belum merata antar wilayah, sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Sebagian wilayah di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara sebagian lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat atau stagnan. Ketimpangan pendidikan juga berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan di Indonesia (Chongvilaivan & Kim, 2020). Tingkat pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat (Patel et al., 2020). Distribusi sumber daya seperti tanah, air, dan energi juga memengaruhi peningkatan ketimpangan di Indonesia (Nugroho et al., 2022). Sumber daya tersebut tidak merata, sehingga sebagian kelompok masyarakat atau wilayah dapat mengaksesnya dengan lebih efisien, sementara sebagian lainnya mengalami kesulitan untuk mengaksesnya.

Upaya pemilihan model akhir menentukan model regresi yang akan digunakan EViews. Penentuan model terbaik antara Common Effect, Fixed Effect, dan After testing the suitability of the model on panel data regression using the Common Effect Model, Fixed Effect Model, and Random Effect Model methods, the best method, according to the test results of the three models, is the Fixed Effect Model.

Hasil persamaan regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 11,142 dan bertanda positif. Apabila variabel kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi dianggap tetap, maka pertumbuhan ekonomi inklusif akan meningkat sebesar 11,142 persen. Variabel kemiskinan (P) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil ini nilai

koefisien variabel kemiskinan sebesar -0,227. Dapat dilihat bahwa apabila terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi inklusif akan menurun sebesar 0,227 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan akan mengakibatkan biaya yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi, yang secara tidak langsung menghambat laju pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi inklusif akan menurun. Jadi, variabel kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Selanjutnya, variabel pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kondisi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien pada variabel pengangguran (U) sebesar -0,08, yang berarti jika pengangguran meningkat sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi inklusif akan menurun sebesar 0,82 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi inklusif. Jadi, variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Ketimpangan ekonomi (EI) merupakan variabel terakhir yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien pada

variabel pengangguran sebesar -7,61, yang berarti jika terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi inklusif akan menurun sebesar 7,618 persen. Berdasarkan data tersebut, tingginya ketimpangan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi inklusif.

Variabel ketimpangan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel ketimpangan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kemiskinan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif karena dapat menghambat potensi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terbatas terhadap sumber daya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai (Silove et al., 2020; Singu et al., 2020). Akibatnya, mereka tidak dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, kemiskinan juga dapat menghambat akses terhadap kredit dan modal usaha, sehingga sulit bagi masyarakat kurang mampu untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada (Banerjee & Jackson, 2020). Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kemiskinan juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Omar & Inaba, 2020; Kaulihowa & Adjasi, 2020). Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga publik (Boin et al., 2020). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dan ekonomi sangat penting. Upaya dapat dilakukan dengan melaksanakan program-program yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, upaya peningkatan akses pendidikan dan keterampilan serta mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah juga perlu dilakukan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi inklusif. Pengaruh negatif kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Erlando et al. 2020; CabezaGarcía et al., 2020; Hidayat et al., 2020).

Pengangguran di Indonesia berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertama, pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi permintaan barang dan jasa, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi (Pulkka, 2020). Kedua, pengangguran dapat menurunkan produktivitas secara keseluruhan, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat (Korkmaz, 2020). Ketiga, pengangguran meningkatkan beban sosial pada pemerintah dan masyarakat (Baldini et al., 2020). Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk memberikan bantuan sosial dan pelatihan kerja, sementara masyarakat akan merasa tertekan karena sulitnya mencari pekerjaan. Keempat, pengangguran dapat memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi, karena pengangguran cenderung menjadi kelompok rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja yang adil dan inklusif sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awad-Warred & Muhtaseb (2020), Aoyagi & Ganelli (2020), dan Ademola & Badiru (2020).

Berdasarkan tingkat pengangguran provinsi tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Maluku. Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Maluku memiliki pertumbuhan ekonomi yang kurang optimal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini dapat memengaruhi lapangan kerja dan menyebabkan tingginya angka pengangguran mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pengangguran. Provinsi Banten dan Jawa Barat memiliki kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung yang menarik banyak penduduk untuk datang dan tinggal di sana (Buchori et al., 2020). Namun, tidak semua migran dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan, sehingga menyebabkan tingginya pengangguran. Maluku merupakan negara kepulauan yang sulit akses yang

menyebabkan kesulitan dalam pengembangan industri dan penciptaan lapangan kerja (Wiweka et al., 2020). Kondisi ini dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran di daerah tersebut.

Sementara itu, angka pengangguran terendah terdapat di Bali, Yogyakarta, dan Sulawesi Barat. Bali dan DI Yogyakarta merupakan destinasi wisata populer di Indonesia (Kataoka, 2020). Sektor pariwisata di kedua provinsi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduk setempat. Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pertanian yang besar (Arsyad et al., 2020). Sektor pertanian di provinsi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bali, Yogyakarta, dan Sulawesi Barat memiliki angka kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat setempat memperoleh akses yang lebih baik terhadap kesempatan kerja dan pelatihan.

Hasil uji regresi estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel ketimpangan ekonomi yang diukur dengan Rasio Gini memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Ketimpangan ekonomi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam berbagai cara. Pertama, ketimpangan ekonomi dapat membatasi akses individu atau kelompok terhadap sumber daya dan peluang yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan (Kraus et al., 2020; Bapuji et al., 2020). Kondisi ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas serta menciptakan lapangan kerja yang dapat memperluas perekonomian. Ketimpangan ekonomi juga dapat menghambat akses individu dan kelompok masyarakat terhadap pasar yang adil dan seimbang serta membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi (Bapuji & Neville, 2020). Kedua, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Neaime & Gaysset, 2020; Tchamyou et al., 2020). Ketidakstabilan sosial dan politik dapat memengaruhi investor dan bisnis, serta mengurangi kepercayaan konsumen, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Terakhir, ketimpangan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, (Bor et al., 2020). Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena pembangunan berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif semua warga negara, dan keberhasilan ekonomi harus didasarkan pada kemajuan yang adil dan inklusif. Ketimpangan pendapatan yang signifikan dapat membatasi akses ke sumber daya dan peluang yang sama serta memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Guest, 2020). Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sangat penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang yang dibutuhkan untuk meningkatkan

produktivitas dan kemakmuran. Kondisi ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti investasi pada pendidikan dan pelatihan, kebijakan yang mendorong inklusivitas dan keadilan, serta kebijakan fiskal yang mendukung redistribusi yang adil dan berkelanjutan. Ketimpangan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif berdampak negatif terhadap Indonesia karena banyaknya kota-kota besar dengan pendapatan per kapita yang tinggi, terutama di Indonesia bagian barat dibandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan timur.. Kondisi ini dapat disebabkan aksesibilitas wilayah, tingkat pembangunan infrastruktur, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan (Marinho et al., 2020; Laurens & Putra, 2020). Diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan meningkatkan infrastruktur transportasi, memberikan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi yang sedang berkembang di suatu wilayah tertentu, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta meningkatkan akses terhadap layanan penting seperti kesehatan dan sanitasi.

Jadi berdasarkan pembahasan bisa ditunjukkan hasil penelitiannya yang berbentuk grafik

dan dampaknya bagi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di Indonesia

1. Semakin tinggi kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan menurun sehingga kemiskinan berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena dapat menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan cenderung memiliki akses terbatas terhadap sumber daya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai. Akibatnya, mereka tidak dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
2. Semakin tinggi pengangguran maka pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan menurun sehingga Pengangguran di Indonesia berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi permintaan barang dan jasa serta menurunkan produktivitas secara keseluruhan, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Selain itu, pengangguran meningkatkan beban sosial pada pemerintah dan masyarakat.
3. Semakin tinggi pengangguran maka pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan menurun Ketimpangan berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena dapat membatasi akses individu atau kelompok terhadap sumber daya, memengaruhi stabilitas sosial dan politik, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

IV. Kesimpulan

Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan terbukti memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia karena ketiganya menghambat produktivitas, mengurangi daya beli, serta mempersempit akses terhadap sumber daya ekonomi. Pemerintah perlu memperkuat program pengentasan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja, serta mendorong investasi di sektor padat karya untuk memperluas kesempatan kerja. Meskipun angka kemiskinan nasional menurun, daerah seperti Papua, NTT, dan Maluku masih memerlukan perhatian khusus melalui pengembangan ekonomi lokal dan dukungan terhadap UMKM. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

References

- Amorós, J. E., Ciravegna, L., Mandakovic, V., & Stenholm, P. (2020). *Necessity or Opportunity? The Effects of State Fragility and Economic Development on Entrepreneurial Efforts*. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 43(4), 725–750. <https://doi.org/10.1177/1042258717736857>
- Arsyad, D. S., Nasir, S., Arundhana, A. I., Phan-Thien, K. Y., Toribio, J. A., McMahon, P., Guest, D. I., & Walton, M. (2020). A One Health Exploration of the Reasons for Low Cocoa Productivity in West Sulawesi. *One Health*, 8, 100107. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2019.100107>
- Atmojo, M. E., & Fridayani, H. D. (2021). An Assessment of Covid-19 Pandemic Impact on Indonesian Tourism Sector. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.18196/jgpp.811338>
- Aziz, A. A., Royani, R., & Syukriati, S. (2021). The Implementation of Family Hope Program in Social Protection and Welfare in West Lombok. *Journal of The Community Development in Asia*, 4(3), 1–11. <https://doi.org/10.32535/jcda.v4i3.1176>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah. Badan Pusat Statistik. Retrieved from: <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Bapuji, H., Patel, C., Ertug, G., & Allen, D. G. (2020). Corona Crisis and Inequality: Why

- Management Research Needs a Societal Turn. *Journal of Management*, 46(7), 1205– 1222. <https://doi.org/10.1177/0149206320925881>.
- Boin, A., Ekengren, M., & Rhinard, M. (2020). *Hiding in Plain Sight: Conceptualizing the Creeping Crisis. Risk, Hazards and Crisis in Public Policy*, 11(2), 116–138. <https://doi.org/10.1002/rhc3.12193>.
- Cabeza-García, L., Del Brio, E. B., & Oscanoa-Victorio, M. L. (2020). Female Financial Inclusion and Its Impacts on Inclusive Economic Development. *Women's Studies International Forum*, 77, 102300. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102300>.
- Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). *Financial Inclusion, Economic Growth, and Poverty Alleviation: Evidence from Eastern Indonesia*. *Heliyon*, 6(10), e05235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>.
- Fauzi, F. Z., Murti, A. A. G. B., Imamah, L. A., & Hapsari, N. (2020). Infrastructure Development in Papua: Features and Challenges. *Policy and Governance Review*, 3(3), 225. <https://doi.org/10.30589/pgr.v3i3.162>
- Hensher, D. A. (2020). What might Covid-19 mean for mobility as a service (MaaS)? *Transport Reviews*, 40(5), 551–556. <https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1770487>.
- Hidayat, I., Mulatsih, S., and Rindayati, W. (2020). The Determinants of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta. *Journal Economia*, 16(2), 200–210. <https://doi.org/10.21831/economia.v16i2.29342>.
- Jetten, J. (2019). The Wealth Paradox: Prosperity and Opposition to Immigration. *European Journal of Social Psychology*, 49(6), 1097–1113. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2552>.
- Kanda, W., & Kivimaa, P. (2020). Energy Research and Social Science What opportunities Could the COVID-19 Outbreak Offer for Sustainability Transitions Research on Electricity and Mobility ? **Energy Research and Social Science**, 68, 101666. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101666>.
- Kataoka, M. (2020). Interprovincial Differences in Labour Force Distribution and Utilization Based on Educational Attainment in Indonesia, 2002–2015. *Regional Science Policy and Practice*, 11(1), 39–54. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12159>.
- Laurens, S., & Putra, A. H. P. K. (2020). Poverty Alleviation Efforts Through MDG's and Economic Resources in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 755–767.
- Lestari, C. D., & Rahmawati, F. (2021). Measuring the Impact of Technology, Politics, and Human Resources on Inclusive Economic Growth in Indonesia. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 8(1), 65. <https://doi.org/10.24252/ecc.v8i1.20427>.
- Libassi, M. (2020). Mining Heterogeneity: Diverse Labor Arrangements in an Indonesian Informal Gold Economy. *Extractive Industries and Society*, 7(3), 1036–1045. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.06.015>.
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Situmorang, M. E., & Nasution, A. (2020). The Role of Infrastructure in Economic Growth and Income Inequality in Indonesia. *Economics and Sociology*, 13(1), 102–115. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-1/7>.
- Nugroho, H. Y. S. H., Indrawati, D. R., Wahyuningrum, N., Adi, R. N., Supangat, A. B., Indrajaya, Y., Putra, P. B., Cahyono, S. A., Nugroho, A. W., Basuki, T. M., Savitri, E., Yuwati, T. W., Narendra, B. H., Sallata, M. K., Allo, M. K., Bisjoe, A. R., Muin, N., Isnani, W., Ansari, F., & Sudomo, A. (2022). Toward Water, Energy, and Food Security in Rural Indonesia: A Review. *Water*, 14(10), 1–25. <https://doi.org/10.3390/w14101645>.
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does Financial Inclusion Reduce Poverty and Income Inequality in Developing Countries? A Panel Data Analysis. *Journal of Economic Structures*, 9, 37. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00214-4>.
- Ratnawati, K. (2020). The Impact of Financial Inclusion on Economic Growth, Poverty, Income Inequality, and Financial Stability in Asia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 73–85. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.073>.

- Sasongko, G., & Huruta, A. D. (2019). The Causality between Inflation and Unemployment: The Indonesian Evidence. *Business: Theory and Practice*, 20, 1–10. <https://doi.org/10.3846/btp.2019.01>
- Singu, S., Acharya, A., Challagundla, K., & Byrareddy, S. N. (2020). *Impact of Social Determinants of Health of the Emerging COVID-19 Pandemic in the United States*. *Frontiers in Public Health*, 8, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00406>.
- Siregar, T. H. (2020). Impacts of Minimum Wages on Employment and Unemployment in Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 25(1), 62–78. <https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1625585>
- Tamsah, H., Ansar, Gunawan, Yusriadi, Y., and Farida, U. (2020). Training, Knowledge Sharing, and Quality of Work-Life on Civil Servants' Performance in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 7(3), 163–176. <https://doi.org/10.29333/ejecs/514>.
- Tchamy, V. S., Asongu, S. A., and Odhiambo, N. M. (2020). The Role of ICT in Modulating the Effect of Education and Lifelong Learning on Income Inequality and Economic Growth in Africa. *African Development Review*, 31(3), 261–274. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12388>.
- Wibowo, M. G. (2020). Human Capital Relation with Welfare in Indonesia and Asean Countries. *Economic Development Analysis Journal*, 8(1), 81–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v8i1.28730>.
- Wirawan, H., & Gultom, Y. M. L. (2021). The Effects of Renewable Energy-based Village Grid Electrification on Poverty Reduction in Remote Areas: The Case of Indonesia. *Energy for Sustainable Development*, 62, 186–194. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2021.04.006>.
- Wiweka, K., Indrajaya, T., Wachyuni, S. S., Adnyana, P. P., & Hanorsian, A. E. (2020). Opportunities and Challenges for the Development of Sustainable Tourism Attraction at Batu Kapal Beach, Central Maluku Lilibooi Village. *Advances in Research*, 19(3), 1–14. <https://doi.org/10.9734/air/2019/v19i330121>.
- Yurui, L., Xuanchang, Z., Zhi, C., Zhengjia, L., Zhi, L., & Yansui, L. (2021). Science of the Total Environment Towards the Progress of Ecological Restoration and Economic Development in China's Loess Plateau and Strategy for More Sustainable Development. *Science of the Total Environment*, 756, 143676. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143676>.